

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Papua adalah salah satu wilayah di Timur Indonesia yang memiliki kisah histori yang sangat unik bahkan hingga saat ini. Pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945, wilayah ini belum sepenuhnya diakui sebagai kedaulatan Indonesia. Hal ini dikarenakan pada saat itu, Belanda yang masih menduduki wilayah ini tidak ingin memberikan Papua kepada Indonesia karena Papua memiliki cadangan hasil bumi yang melimpah. Kemudian masalah ini akhirnya dibawa ke forum internasional pada tahun 1949 pada Konferensi Meja Bundar atau KMB, namun hasil dari KMB tersebut yang menetapkan penyerahan kedaulatan serta wilayah jajahan oleh Belanda kepada Indonesia belum bisa dilaksanakan akibat konflik perebutan wilayah ini.

Belanda yang ingin memerdekakan Papua dari Indonesia berdalih bahwa rakyat Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dari warga Indonesia dari pulau lainnya.¹ Puncaknya pada tahun 1969, dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (PAPERA) Papua untuk menentukan nasib Papua apakah bergabung dengan Indonesia atau memilih untuk menegakkan negaranya sendiri. Papera yang dilaksanakan dan diawasi langsung oleh PBB diyakini bisa menjadi jawaban atas sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda serta bisa menegakkan demokrasi di tanah Papua.

Hasil dari Pepera yang dilakukan kurang lebih 16 hari menjawab permasalahan yang selama ini terjadi dimana mayoritas rakyat Papua memilih berintegrasi dengan Indonesia. Namun, setelah diumumkannya hasil akhir ini, justru ada beberapa pihak yang tidak menerima hasil Papera ini

¹ Ester Yambeyapdi, "Papua: Sejarah Integrasi Yang Diingat Dan Ingatan Kolektif," *Indonesian Historical Studies* 2, no. 2 (2019): 89–95.

karena dianggap adanya ketidakadilan dalam pemungutan suara. Salah satu aktor yang aktif dalam penolakan ini adalah aktivis kemerdekaan IRIAN, Herman Wayoi.² Menurut mereka demokrasi Papua ini tidak berjalan semestinya karena suara yang diambil pada Papua ini bukan berdasarkan suara dari masing-masing individu rakyat Papua, melainkan satu suara perwakilan dari masing-masing organisasi adat yang diwakili berdasarkan musyawarah dan mufakat suku adat itu sendiri.

Proses harus tetap berlanjut dan hasilnya telah ditetapkan oleh PBB bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia setelah hasil Papua yang menunjukkan rakyat Papua mayoritasnya ingin berintegrasi dengan Indonesia³. Puncaknya, muncul gerakan organisasi separatisme dan aktor politik yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia pada tahun 1965. Gerakan ini muncul sebagai respons atas ketidakpuasan hasil Papua. Hal ini tentu saja menjadi momok tersendiri bagi pemerintahan tersebut karena apabila terjadi perselisihan di dalam tubuh pemerintahan, maka suku-suku di sana pun akan ikut campur dalam permasalahannya⁴. Gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan Papua ini tidak hanya sebatas tentang gerakan separatisme, akan tetapi terdapat juga gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh aktivis-aktivis dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kemudian dalam proses Dekolonisasi yang terjadi di Papua ini, wilayah ini kemudian dikenal sebagai Papua Barat dalam istilahnya namun tetap mencakup semua wilayah Papua. Hal ini merujuk pada seluruh wilayah Papua yang mereka anggap sebagai entitas terpisah dari Indonesia, berdasarkan identitas Melanesia dan sejarah sebelum 1969. Dalam

² Wanda Marshanda, "Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pembebasan Irian Barat (1949-1962)," *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1, no. 4 (2023): 1–11.

³ Rycho Korwa, "Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi* (2013): 1–9.

⁴ Indah Putri Mardiani et al., "Konflik Internal Antara Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Separatis Di Papua," *Jurnal Syntax Fusion* 1, no. 2 (2021): 49–57.

pandangan mereka, pembagian administratif oleh Indonesia dianggap sebagai upaya asimilasi dan penghancuran identitas Papua sebagai satu kesatuan.

Dalam studi Hubungan Internasional, Dekolonisasi didefinisikan sebagai upaya untuk melepaskan warisan kolonial yang selama ini menduduki suatu wilayah. Lebih lanjut, Dekolonisasi merupakan proses transisi suatu kontrol pemerintah kolonial menjadi wilayah atau kedaulatan yang mandiri tanpa adanya intervensi, proses ini mencakup hak *self determination* yang sebagaimana merupakan hak yang telah diatur oleh PBB yang merupakan sebuah hak untuk kebebasan menentukan nasib sendiri. Selain dari itu, dekolonisasi juga didefinisikan sebagai proses transformasi struktur baik itu politik, sosial, budaya menjadi ciri khas tersendiri tanpa adanya warisan dari pemerintah kolonial sebelumnya.⁵

Greg Fry dalam bukunya yang berjudul “Framing The Islands” mengungkapkan bahwa Dekolonisasi merupakan sebuah upaya untuk menghapus kontrol kolonial yang menguasai wilayah sebelumnya menjadi wilayah yang kuat secara mandiri baik itu dari segi institusional maupun secara budaya dengan mengikuti budaya asli dari nenek moyang wilayah tersebut karena budaya yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebelumnya berbeda dengan budaya asli dari suatu wilayah tersebut. Greg Fry menekankan bahwa regionalisme adalah alat utama pengukuran bagaimana wilayah tersebut bisa dimasukkan ke dalam suatu warisan budaya nenek moyang. Dalam konteks isu Papua Barat, Fry menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Papua Barat ini merupakan “Unfinished Decolonization” karena proses integrasi Papua ke Indonesia setelah Pepera 1969 itu dianggap tidak sah, hal ini diperkuat dengan sejarah diskriminasi, pelanggaran HAM hingga eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan di tanah Papua membuat para aktivis

⁵ Roderic Alley, *Framing the Islands: Power and Diplomatic Agency in Pacific Regionalism* by Greg Fry, *The Contemporary Pacific*, vol. 33, 2021.

pro-kemerdekaan Papua berasumsi bahwa ini tidak lepas dari penjajahan berkelanjutan dari Belanda hingga Indonesia.⁶ Selanjutnya Frantz Fanon dalam bukunya yang berjudul “The Wretched of the Earth” mendefinisikan bahwa Dekolonisasi merupakan sebuah proses untuk melepaskan diri kontrol penjajah yang selama ini menduduki suatu wilayah demi mengembalikan harga diri dan martabat masyarakat lokal yang selama ini hilang akibat adanya tekanan psikologis dan penindasan yang terjadi di wilayah tersebut.⁷ Fanon menegaskan bahwa Dekolonisasi dicapai dengan cara pembalasan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial selama berkuasa, dalam hal ini pembalasan tersebut harus bersifat kekerasan demi mengembalikan harga diri dan martabat masyarakat asli. Teori dekolonisasi menurut Fanon ini lebih dijelaskan kepada pemberontakan bersenjata untuk melawan struktur kolonial.

Ketidakpuasan terhadap hasil dari Pepera 1969 memunculkan polemik dan masalah terus berlanjut hingga saat ini. ketidakpuasan yang sebelum Pepera tersebut dimulai sudah memunculkan gerakan-gerakan aktivis pro-kemerdekaan Papua barat. Puncaknya pada tahun 1965 muncul gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang didasari atas ketidakpuasan terhadap dinamika yang terjadi terhadap konflik Papua terutama pasca Operasi militer Trikora yang dianggap sebagai penindasan kepada rakyat Papua.⁸ United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) muncul pada tahun 2014, organisasi ini merupakan “wadah” dari seluruh organisasi pro kemerdekaan Papua seperti West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), National Federal Republic of West Papua (NFRPB), West Papua National Parlement (WPP).⁹ Seperti

⁶ Sehrenneta Bella Fiona and Retno Kusniati, *Status Hukum Papua Barat: The Right to Self-Determination Atau National Integrity?*, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, vol. 1, 2021.

⁷ FRANTZ FANON, *The Wretched of the Earth*, ed. Richard Philcox, vol. 4 (GROVE PRESS, 2004).

⁸ Poltak Portogi Nainggolan, “International Activities of Papua Separatist Movement,” *Jurnal DPR RI* Volume 19, no. No.3 (2014): 181–199.

⁹ Abdillah Satari Rahim and Fauzia Gustarina Cempaka Timur, “Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Dalam Hukum Internasional Terhadap Kedaulatan Indonesia,” *Interdependence Journal of International Studies* 2, no. 1 (2021): 11–30.

halnya dengan gerakan separatisme, ULMWP bergerak dalam menyuarakan keadilan dan kemerdekaan Papua Barat yang dianggap sebagai wilayah kolonial pemerintah Indonesia. Dalam usaha mereka, mereka memakai 2 upaya untuk menjalankan misi tersebut yaitu upaya dari dalam negeri Indonesia, maupun ke luar Indonesia. Upaya dalam negeri tersebut mencakup teror militer yang dilakukan di Papua untuk menekan pemerintah Indonesia dan upaya ke luar negeri tersebut mencakup upaya diplomasi internasional untuk mencari dukungan dan pengakuan sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri atas hasil kemauan dari rakyat Papua itu sendiri. Kemudian mereka juga melakukan gerakan transnasional berupa kampanye pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Strategi internal yang dilakukan oleh ULMWP yang TPNPB sebagai eksekutor teror militer sejalan dengan konsep Dekolonisasi menurut Fanon. Begitu juga strategi eskternal yang dilakukan dengan memanfaatkan prinsip solidaritas Bangsa Melanesia pada organisasi regional Melanesian Spearhead Group (MSG) juga mencerminkan prinsip Dekolonisasi menurut Greg Fry.

1.2 Rumusan Masalah

Isu pemberontakan di Papua khususnya di Papua Barat menjadi salah satu tantangan yang kompleks yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Bukan hanya dari segi keamanan negara dan wilayah, akan tetapi dari segi hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara terutama kawasan Pasifik harus diperhatikan karena negara-negara kawasan Pasifik pada dasarnya ikut campur dalam urusan gerakan kemerdekaan Papua ini. Di dalam negeri, mereka berkolaborasi dengan OPM yang pada dasarnya menggunakan *hard power* atau intervensi militer untuk melemahkan kekuatan keamanan Indonesia. Maka dengan ini mereka benar-benar berniat untuk membentuk negara sendiri karena usaha dari dalam dan keluar saling berhubungan agar tujuan

tersebut tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia oleh ULMWP dengan berfokus pada 2 aspek upayanya. Yang pertama upaya yang dilakukan dari dalam negeri seperti aktivitas teror dan penyerangan, lalu yang kedua yaitu upaya-upaya yang dilakukan ke luar Indonesia itu sendiri seperti diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dilampirkan pada bagian rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang dapat diteliti terbagi menjadi dua :

1. Bagaimana upaya internal Dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia yang dilakukan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?
2. Bagaimana upaya eksternal Dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia yang dilakukan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi atau upaya apa saja yang telah dilakukan oleh ULMWP dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua barat baik itu dari segi militer maupun pada forum internasional sehingga upaya Dekolonisasi tersebut sangat susah untuk diberantas.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pembaca dan khususnya bagi peneliti di antara-Nya :

- a) Manfaat Akademis : penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait dengan

konsep Dekolonisasi dan bagaimana ULMWP melakukan upaya Dekolonisasi ini untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia baik itu dari upaya dalam negeri, maupun upaya yang dilakukan untuk meminta dukungan internasional. Penelitian ini diharapkan menambah literatur atau kajian yang bisa memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan tentang upaya kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia dengan memakai konsep Dekolonisasi.

- b) Manfaat Praktis : penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi kehidupan, khususnya bagi pelajar atau mahasiswa, dosen, akademisi hubungan internasional, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta masyarakat sipil untuk menyusun strategi kebijakan, menjadi bahan pertimbangan, dan membantu riset yang akan datang. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi indikator untuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi upaya Dekolonisasi Papua Barat oleh ULMWP.

1.6 Studi Pustaka

Peneliti melakukan beberapa literasi dan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu dan berkaitan dengan judul yang diangkat. Hal ini dilakukan untuk menemukan perbedaan serta pembaruan pada penelitian yang sudah ada. Selain itu penelitian-penelitian yang digunakan diharapkan akan menunjang peneliti untuk menemukan hasil penelitian yang terbaru. Terdapat 5 studi pustaka yang relevan dengan topik penulis yakni mengenai Upaya Dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia oleh ULMWP :

Pertama , artikel jurnal yang berjudul “Menuju Tercapainya Kemerdekaan Papua Dalam Kerangka Bernegara” oleh Aris Sarjito¹⁰. Artikel ini membahas tentang upaya untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia dengan menggunakan perspektif Montevideo tahun

¹⁰ Aris Sarjito, “Menuju Tercapainya Kemerdekaan Papua Dalam Kerangka Bernegara,” *Society* 11, no. 2 (2023): 343–358.

1933. Artikel ini menitikberatkan pada upaya yang dilakukan oleh *Organisasi Papua Merdeka* (OPM) untuk memerdekakan Papua dari Indonesia dengan menggunakan indikator-indikator yang terdapat pada konsep Konvensi Montevideo. Pada artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dari data sekunder sebagai tinjauan literatur.

Fokus pada penelitian ini adalah tentang bagaimana dinamika-dinamika sosial dan politik yang terjadi di Papua Barat termasuk dukungan organisasi-organisasi internasional seperti UNPO dan dukungan negara-negara untuk kemerdekaan Papua Barat. Artikel ini memberikan kontribusi bagi penulis tentang upaya kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh OPM dengan memperhatikan faktor-faktor penting yang telah ditetapkan oleh Konvensi Montevideo seperti memiliki stabilitas populasi, mendapat dukungan internasional, penetapan wilayah, hingga pembentukan pemerintahan yang sah.

Meskipun demikian, perbedaan yang mungkin akan terasa pada penelitian ini dengan apa yang penulis teliti adalah di dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tentang Organisasi politik di bawah naungan OPM yaitu ULMWP. Studi kasus ini dapat memberikan wawasan bagi penulis untuk dijadikan referensi tentang beberapa kejadian pemberontakan nyata yang dilakukan oleh OPM bahkan sampai saat itu usaha-usaha tersebut masih terjadi.

Artikel yang kedua berjudul “Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua” oleh Poltak Partegi Nainggolan¹¹. Artikel ini membahas tentang bagaimana isu kekacauan di Papua ini sengaja di internasiolisasikan. Artikel ini berfokus pada isu konflik di Papua Barat antara pemerintah Indonesia dengan para aktivis pejuang kemerdekaan Indonesia yang dimana OPM melakukan gerakan diplomasi internasional untuk mencari dukungan dari negara-negara sekitar untuk memerdekakan diri. Di dalam artikel ini dibahas tentang upaya diplomasi internasional

¹¹ Nainggolan, “International Activities of Papua Separatist Movement.”

yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan. Artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dan melakukan wawancara serta melakukan observasi lapangan di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Kota Manokwari untuk mendukung hasil temuan ini.

Artikel ini berkontribusi bagi penelitian penulis karena ada persamaan konsep yang dilakukan oleh OPM terhadap konsep yang penulis paparkan yaitu upaya diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan khususnya ke negara sekitar Pasifik dan organisasi *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yang dimana aktor utama dalam gerakan diplomasi internasional itu sendiri adalah pimpinan dari ULMWP yaitu Benny Wenda.

Studi pustaka yang ketiga, artikel jurnal yang berjudul “Perang Perebutan Irian Barat : Sebuah Tinjauan Historis” oleh Doly Andhika Putra dan Ghazalie¹². Artikel ini membahas tentang dinamika konflik yang terjadi di Papua Barat mulai dari dinamika politik, militer, dan diplomasi yang dilakukan oleh dua aktor yang terlibat pada konflik ini yaitu aktivis pro kemerdekaan Papua dan juga pemerintah Indonesia. Artikel ini melihat dinamika masalah yang terjadi di Papua dengan pandangan historis yang terjadi di sana. Artikel ini juga menjawab bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan Papua ke dalam wilayahnya meskipun pada saat itu Papua masih berada di tangan Belanda hingga muncullah PAPERA pada tahun 1969. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode historis kritis.

Artikel ini juga membahas tentang alasan mengapa upaya dekolonisasi Papua ini dilakukan oleh aktor politik Papua. Hal ini disebabkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara keras dan melibatkan kekuatan militer sehingga menyebabkan banyak korban dan membuat tingkat kepercayaan kepada pemerintah menjadi menurun. Total 100.000 jiwa

¹² Doly Andhika Putra and Ghazalie Ghazalie, “Perang Perebutan Irian Barat: Sebuah Tinjauan Historis,” *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)* 7, no. 1 (2024): 66.

menjadi korban dari upaya operasi militer untuk menumbangkan OPM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 40 tahun sejak PAPERA diresmikan.

Jurnal ini memberikan kontribusi kepada Penulis dari segi historis konflik Papua Barat dan bagaimana upaya dekolonisasi ini bisa muncul dan hingga sekarang setelah kurang lebih 60 tahun aksi ini belum bisa ditumpaskan oleh pemerintah Indonesia.

Studi pustaka keempat, artikel jurnal yang berjudul “Status *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Indonesia”¹³ oleh Abdillah Satari Rahim dan Fauzia Gustiarina. Artikel ini membahas tentang bagaimana ULMWP yang selama ini melakukan upaya Dekolonisasi di Papua Barat jika dipandang kedudukan organisasi tersebut menurut Hukum Humaniter Internasional. Menurut ULMWP, dalam konflik di Papua barat, mereka sudah memenuhi kriteria sebagai status *Belligerent*. Status *Belligerent* adalah hak-hak yang dimiliki oleh pemberontak dalam suatu negara yang berkonflik yang biasanya dipakai untuk narasi memerdekakan diri. Hak-hak tersebut berupa hak untuk diakui dalam konflik, hak untuk melakukan operasi militer, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum perang, serta hak untuk mendapatkan dukungan internasional. Hak-hak tersebut harus ditaati dan dilindungi langsung oleh HHI.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status dari ULMWP menurut HHI belum bisa dikatakan sebagai kelompok *Belligerent*, hal ini dikarenakan dalam status tersebut ULMWP hanya bisa memenuhi satu kriteria nya saja yaitu memiliki pemimpin yang jelas. Namun kriteria lainnya seperti penggunaan lambang khusus, penggunaan senjata secara terbuka, operasi sesuai ketentuan perang, serta mendapat pengakuan dari negara lain belum terpenuhi.

Artikel ini berkontribusi bagi penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana status ULMWP

¹³ Rahim and Cempaka Timur, “Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Dalam Hukum Internasional Terhadap Kedaulatan Indonesia.”

ini jika dipandang pada hukum internasional dan memberikan penjelasan bahwa ULMWP juga tidak mematuhi hukum internasional sebagai kelompok pemberontak yang taat pada hukum internasional. Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga tidak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan *Belligerent* untuk melakukan penyelesaian konflik Papua Barat dengan ULMWP.

Artikel terakhir berjudul “Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Isu Papua Barat” oleh Muhammad Fadhilah¹⁴. Jurnal ini membahas tentang adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh *Melanesia Spearhead Group* (MSG) dalam menangani isu di Papua Barat yang dimana isu tersebut adalah isu yang dipakai oleh ULMWP untuk menyuarakan kemerdekaan. Di dalam artikel ini MSG pada awalnya memiliki komitmen dalam mendukung kemerdekaan bangsa melanesia. Termasuk Papua, merupakan bagian dari ras melanesia. Data yang ditampilkan pada jurnal ini adalah yang pertama, pada tahun 2011, KTT MSG yang pada awalnya membahas tentang HAM dan dekolonisasi di Papua tetapi malah mengangkat Indonesia sebagai observer yang pada dasarnya Indonesia lah yang bertanggung jawab atas isu ham yang terjadi di Papua. Lalu yang kedua, pada KTT 2015 yang memberikan kewenangan kepada ULMWP sebagai observer sedangkan kepada Indonesia ditunjuk sebagai associate member. Puncaknya pada tahun 2018, upaya yang pada awalnya memasukkan ULMWP sebagai anggota penuh dari MSG Group ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa inkonsistensi komitmen yang ditunjukan oleh MSG ke isu Papua Barat itu sangat buruk.

Artikel ini berkontribusi bagi penelitian penulis karena memberikan data-data tentang apa saja yang menjadi alasan mengapa MSG Group tidak bisa memberikan dukungan secara langsung dan mutlak kepada ULMWP. Pada dasarnya ULMWP meminta dukungan kepada MSG Group terlebih dahulu untuk menjadi batu loncatan nantinya agar mendapat dukungan dari negara-negara luar

¹⁴ Muhammad Fadhilah, “Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) Dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji Dan Papua Nugini,” *Indonesian Perspective* 4, no. 1 (2019): 59–81.

lainnya sehingga bisa dimasukkan ke dalam pertimbangan PBB untuk memberikan kedaulatan kepada Papua.

1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori Dekolonisasi. Menurut Greg Frey dalam bukunya yang berjudul “Framing The Island”¹⁵, mendefinisikan bahwa Dekolonisasi adalah upaya untuk melakukan proses transisi dari yang semula dikuasai oleh kolonial menjadi suatu wilayah yang lebih mandiri dan memiliki kemerdekaan. Dekolonisasi ini bukan hanya sekedar memerdekakan wilayah yang berada pada suatu kekuasaan kolonial, namun juga mencakup transformasi dari struktur institusional, norma, dan kerangka berpikir yang memungkinkan masyarakat sipil terutama warga asli Papua mengontrol nasib mereka sendiri. Menurut Fry, Dekolonisasi bukan hanya menghapus kontrol penuh dari kekuasaan kolonial yang selama ini dianggap menjajah wilayah tersebut, tetapi harus menyertakan transisi politik dan budaya yang menggunakan dan mencerminkan kepentingan masyarakat asli.

Pada dasarnya, Dekolonisasi terjadi atas dasar kemauan masyarakat asli yang terjajah untuk merdeka. Namun, kemauan tersebut tidaklah cukup untuk menekan kekuasaan kolonial. Harus ada negara ataupun aktor yang ikut membantu dalam proses Dekolonisasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, ULMWP menggunakan kekuatan regional melalui jalur diplomasi untuk mendapatkan dukungan agar menekan pemerintah Indonesia agar bisa melepaskan Papua Barat. Langkah yang pertama diambil oleh ULMWP sejauh ini adalah mengambil hati dan membangun solidaritas dengan aktor-aktor *Melanesian Spreadhead Group* (MSG) dengan narasi yang menarik perhatian aktor-aktor tersebut seperti adanya persamaan ras antar masyarakat *Melanesia*.

Greg Fry juga menyatakan bahwa identitas budaya dan sejarah menjadi elemen penting dalam

¹⁵ Alley, *Framing the Islands: Power and Diplomatic Agency in Pacific Regionalism* by Greg Fry, vol. 33, p. .

proses Dekolonisasi. Kemudian dimensi regionalisme juga menjadi tambahan poin penting dalam proses dekolonisasi tersebut. menurut Fry, regionalisme bisa dijadikan alat untuk memperlancar alur Dekolonisasi. Dalam hal ini aktor-aktor regional sering kali akan mendukung aktor lain yang berada dalam ruang lingkup regional mereka untuk mencapai asas kebersamaan. Dalam hal ini, ULMWP yang sejak dulu berjuang untuk mendapatkan tempat dalam menjadi anggota penuh MSG untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara tersebut bisa dikatakan cukup berhasil.

Meskipun begitu, terdapat beberapa tantangan yang bisa menghalangi terjadinya sebuah Dekolonisasi. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa adanya ketergantungan ekonomi dan mendapat tekanan dari kekuatan besar membuat upaya untuk Dekolonisasi tidak berjalan mulus. Dalam hal ini, wilayah yang berusaha untuk memisahkan diri harus memikirkan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat lokal dan bagaimana dampak perekonomian wilayah tersebut. karena tiang utama dari bertahannya suatu wilayah adalah dari indikator perekonomiannya. Dalam kasus ini, Papua Barat yang berusaha untuk dimerdekakan oleh aktor-aktor politik harus berpikir 2 kali untuk memisahkan diri dari Indonesia. Karena pada dasarnya Dekolonisasi harus sepenuhnya dilakukan, tidak setengah-setengah dengan hanya sebatas memisahkan diri saja tetapi harus meninggalkan bekas-bekas kolonialisme seperti ekonomi, budaya, dan lain-lain

Sebenarnya ada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya upaya dekolonisasi menurut Greg Frey ini. Namun, jika penulis artikan dengan apa yang terjadi selama ini adalah upaya dekolonisasi yang terjadi di Papua Barat disebabkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah Indonesia dalam menangani isu ini. Terutama kurangnya terjadi pemerataan pembangunan dan SDM yang terjadi di Papua serta adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebih membuat masyarakat Papua menjadi tidak nyaman apalagi banyak terjadi diskriminasi terhadap warga papua.

Kemudian dalam menganalisis penelitian yang penulis sedang teliti, penulis menggunakan konsep Dekolonisasi menurut Frantz Fanon dalam bukunya yang berjudul “The Wretched of The Earth”¹⁶. Bisa dikatakan teori dekolonisasi yang dipahami oleh Fanon lebih kepada tindakan yang dianggap keras. Menurut Fanon, upaya Dekolonisasi yang dilakukan oleh suatu pihak bukan hanya bersifat politik semata, namun juga mencakup transformasi sosial dan budaya. Dalam hal ini masyarakat yang selama ini harus berjuang untuk memulihkan martabat dan budaya mereka yang selama ini seakan-akan dirampas oleh kolonialisme.

Menurut Fanon, kekerasan adalah aspek utama bagi tercapainya proses Dekolonisasi. Artinya, tindakan-tindakan yang bersifat anarkis juga harus diperlukan untuk mendukung upaya Dekolonisasi untuk berhasil. Menurutnya, kolonialisme yang dilakukan selalu didasarkan oleh kekerasan fisik dan mengganggu psikologis masyarakatnya. Negosiasi bukanlah jalan yang bisa ditempuh untuk menggapai dekolonisasi, karena pada dasarnya kolonial akan terus mempertahankan kekuasaannya bagaimanapun caranya namun tidak bisa memberikan perhatian ekstra kepada korbannya.

Kekerasan bukan hanya sebatas alat untuk mengusir penjajah, namun lebih didefinisikan sebagai cara untuk membebaskan diri dari belenggu kolonial yang mengharuskan pelaku dekolonisasi untuk melibatkan kekerasan pula. Hal ini juga digunakan untuk membebaskan diri dari rasa rendah diri dan ketidakmampuan untuk bertahan pasca-kolonial. Kekerasan tersebut menurut Fanon adalah cara untuk mendapatkan harga diri masyarakat yang terjajah dan mendapatkan kembali identitas mereka sebagai warga yang merdeka. Bukan hanya untuk pembebasan fisik, kekerasan yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk proses psikologis untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk bisa berdiri sendiri sebelum dijajah oleh

¹⁶ Fanon, *The Wretched of the Earth*, vol. 4, p. .

pemerintahan kolonial. Pada dasarnya kekerasan yang dilakukan ini harus mempunyai arah dan penyebab yang benar-benar dirasakan selama ini. dalam hal ini faktor utama yang menyebabkan terjadinya penggunaan kekerasan untuk mencapai Dekolonisasi adalah adanya kekerasan akan ketertindasan. Menurut kaum terjajah, sistem yang diterapkan oleh kolonial sering kali mengabaikan kepentingan suatu budaya atau adat yang terdapat pada suatu wilayah. Sehingga secara terus-terusan mereka akan merasa tertindas sehingga muncul kesadaran bahwa sistem ini harus dilawan agar tidak mematikan kaum yang terjajah.

Dalam kasus di Papua Barat ini, bentuk kekerasan yang dimaksud oleh Fanon untuk mencapai Dekolonisasi adalah aksi-aksi teror yang dilakukan oleh organisasi berbasis militer OPM. Mereka melakukan kekerasan bersenjata untuk menggapai upaya Dekolonisasi ini. Tujuan utama mereka yaitu untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat yang bisa berdiri sebagai sebuah negara. Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, mereka terus-terusan melakukan teror kepada pasukan militer Indonesia bahkan kepada masyarakat Papua itu sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Upaya militer yang dilakukan oleh OPM ini memiliki tujuan agar pemerintah Indonesia mau mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat karena dianggap tidak sah sebagai wilayah Indonesia yang pada dasarnya sudah diresmikan pada PEPERA 1969. Namun, mereka beranggapan bahwa adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada para pemilih yang diutus menjadikan perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan harus dilakukan ulang secara demokratis.

Dari 2 konsep Dekolonisasi yang digagas oleh Frantz Fanon dan Greg Frey sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membebaskan diri dari pemerintahan kolonial yang menduduki suatu wilayah. Namun pada akhirnya pandangan-pandangan tentang upaya tercapainya Dekolonisasi ini bisa dijadikan acuan dan mekanisme agar

tercapainya penelitian ini dan bisa menghasilkan temuan-temuan terbaru.

Dari konsep Dekolonisasi yang dijelaskan oleh 2 ahli sarjana yang berbeda pandangan terhadap Dekolonisasi, penulis mencoba mengaitkannya kepada penelitian yang sedang diteliti. Yang pertama, Dekolonisasi menurut Greg Frey yang lebih mengutamakan dukungan regional dan aspek diplomasi internasional untuk mencapai Dekolonisasi itu sendiri agar mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Lalu yang kedua, Dekolonisasi menurut Frantz Fanon yang lebih menggambarkan konsep Dekolonisasi sebagai upaya yang dilakukan dengan kekerasan dan intervensi militer dalam mencapai Dekolonisasi tersebut. Dari dua indikator itulah penelitian ini akan diteliti untuk menganalisis bagaimana upaya Dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia.

Maka dari itu penulis mencoba untuk membuat perbandingan dari kedua pemahaman konsep yang dilakukan oleh Greg Frey dan Frantz Fanon dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Dekolonisasi menurut Fanon dan Frey

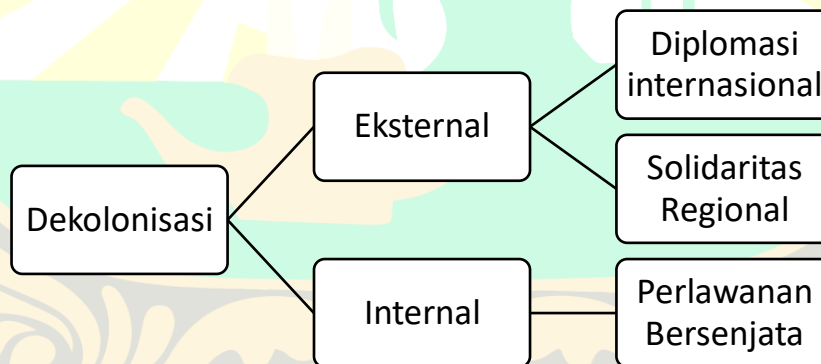
Aspek	Frantz Fanon	Greg Frey
Definisi	Dekolonisasi menurut Fanon adalah proses transisi dari suatu wilayah yang dilakukan secara radikal dan didasari dengan kekerasan. Ia memandang bahwa upaya kolonial suatu wilayah sebelumnya didasari oleh penjajahan dan upaya dekolonisasinya juga harus didasari dengan cara yang keras juga.	Dekolonisasi menurut Frey lebih kepada proses transisi suatu wilayah untuk merdeka secara penuh dan melalui mekanisme dukungan dan pengakuan negara-negara luar berdasarkan usaha diplomasi.
Tujuan	Pembebasan suatu wilayah dari dominasi kolonial baik secara fisik dan psikologis namun menekankan perlawanan bersenjata.	Berfokus kepada penghapusan struktur kolonial yang ada sebelumnya baik itu dari struktur institusional, budaya, sosial maupun struktur ekonomi yang harus mandiri.

Proses	Perlawanan bersenjata dan kekerasan untuk menekan pemerintah kolonial.	Menekankan dialog dan diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan serta penekanan terhadap pelaku kolonial.
--------	--	--

Sumber : kesimpulan dari buku *The Wretched of the Earth* dan *Framing the Islands*

Bisa dilihat dari tabel tersebut definisi Dekolonisasi menurut Frantz Fanon dan Greg Frey sebenarnya memiliki arti dan tujuan yang hampir sama, yaitu untuk menghapus kolonialisme dari suatu wilayah untuk menjadi wilayah yang merdeka. Namun terdapat perbedaan proses untuk mencapai Dekolonisasi tersebut. Maka di dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengaitkan kedua konsep tersebut untuk dijadikan mekanisme Dekolonisasi Papua Barat melalui dua aspek. Yaitu upaya dari dalam dan upaya ke luar. Mekanisme tersebut digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Mekanisme Dekolonisasi Menurut Frey dan Fanon



Para peneliti dan pemikir dalam studi Hubungan Internasional (HI) semakin memandang teori dekolonisasi sebagai alat penting untuk membongkar akar kolonial dalam disiplin ini, yang sering kali dianggap terlalu berpusat pada perspektif Barat (Eurocentric) dan mengabaikan pengalaman dari Global South, masyarakat Indigenous, serta dampak sejarah kolonialisme. Teori dekolonisasi di sini bukan hanya tentang proses historis pasca-perang dunia, melainkan upaya epistemologis dan material untuk "mereimajinasi" HI agar lebih inklusif, menghindari hegemoni

Barat, dan mengakui keragaman pengetahuan global. Pendekatan ini muncul dari kritik pascakolonial yang menekankan bahwa HI lahir dari konteks imperialisme, di mana teori-teori utama seperti realisme atau liberalisme sering kali membenarkan ketidakadilan rasial dan kolonial.

Dekolonisasi bukan proses linear atau performatif, melainkan "messy" (berantakan) karena melibatkan alienasi dari identitas kolonial dan pemulihan unsur budaya indigenous secara selektif, seperti yang diinspirasi oleh Frantz Fanon. Dalam Ekonomi Politik Internasional (IPE), pemikir seperti yang terinspirasi dari teori ketergantungan melihat dekolonisasi sebagai pemulihan perspektif dari Dakar atau pemikiran dependensia untuk menantang dominasi Global North. Tantangannya termasuk mengatasi tabu terhadap analisis historis-kualitatif dan memastikan suara marginal tidak hanya ditambahkan sebagai token, melainkan mengubah inti disiplin. Secara keseluruhan, para pemikir HI melihat dekolonisasi sebagai tanggung jawab bersama untuk membuat disiplin lebih adil, karena HI yang terkolonisasi merendahkan semua pihak.¹⁷

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang dilakukan oleh seseorang untuk meneliti suatu dengan mengumpulkan data berdasarkan sumber informasi yang tersedia seperti wawancara, observasi, analisis dokumen kemudian menggunakan analisis yang

¹⁷ Somdeep Sen, "Decolonising to Reimagine International Relations: An Introduction," *Review of International Studies* 49, no. 3 (2023): 339–345.

bersifat deskriptif dan interpretatif dalam menginterpretasikan data-data tersebut.¹⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif ialah suatu pendekatan penelitian yang mempunyai fokus pada pengumpulan data dan analisis data yang mendetail pada objek yang diteliti melalui berbagai sumber informasi yang didapatkan¹⁹.

1.8.2 Batasan Penelitian

Tujuan pembatasan pada penelitian ini adalah untuk menjadikan pembahasan yang akan di bahas pada penelitian ini bisa terfokus pada permasalahan yang akan di bahas dan tidak melebar dari topik yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis mengambil batasan rentang waktu penelitian dari tahun 2015 sampai 2024. Alasan rentang waktu yang dipilih tersebut adalah karena pada tahun 2015, ULMWP ini secara mengejutkan dipilih sebagai *Observer* pada pertemuan *Melanesian Spreadhead Group* (MSG) pada Juni 2015 di Honiara, Kepulauan Solomon. Kemudian dari segi militer, penulis akan menyertakan beberapa aksi teror yang dilakukan oleh OPM dalam kurun waktu yang ditentukan sebelumnya sebagai bentuk upaya Dekolonisasi yang dilakukan oleh ULMWP untuk memerdekakan Papua Barat.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah subjek utama dalam sebuah penelitian. Subjek ini dapat berupa kelompok, individu, organisasi, negara, peristiwa, atau fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini. Unit analisis pada penelitian ini adalah strategi Dekolonisasi ULMWP. Pada kasus ini, unit analisa disebut variabel dependen, selanjutnya adalah variabel independen yang

¹⁸ YY. Chu, PH. and Chang, "John W, Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," *Journal of Social and Administrative Sciences* 4, no. June (2017): 3–5.

¹⁹ Christine Riani Elisabeth and Ika Kusdian Novanti, "Analisis Layanan Pick Up Service O-Ranger Dalam Peningkatan Pendapatan Surat Dan Paket Logistik Pada Kantor Pos Pemeriksa Purworejo," *Jurnal Akuntansi* 17, no. 01 (2023): 30–41.

disebut unit eksplanasi. Unit eksplanasi ini adalah sesuatu dari dampak terhadap unit analisa yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini unit eksplanasinya adalah dukungan MSG group terhadap Dekolonisasi Papua Barat.

Tingkat analisis pada penelitian ini adalah target dari apa yang penulis teliti dimana penulis memperoleh gambar, penjelasan, dan memperkirakan tentang apa yang terjadi pada isu yang akan diteliti. Tingkat analisis ini akan membantu penulis dalam menjelaskan penelitian yang sedang diteliti. Tingkat analisis yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tingkat organisasi (ULMWP dan MSG Group). Hal ini dikarenakan pembahasan yang akan penulis uraikan berfokus pada analisis strategi Dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia yang dilakukan oleh ULMWP.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data kemudian dikumpulkan untuk dianalisis sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Pada data primer, penulis mendapatkan akses atau link dengan akademisi-akademisi yang menjadikan isu-isu papua sebagai disertasinya kemudian penulis juga mendapatkan akses kepada contact center dari ULMWP itu sendiri. Kemudian pada data sekunder, penulis mengumpulkan data-data, studi pustaka, maupun jurnal yang membahas tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh ULMWP yang mengarah pada aktivitas TAN.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya untuk menata ataupun mencari hasil observasi, wawancara, dan lainnya secara sistematis agar penelitian yang sedang dilakukan

menghasilkan pemahaman bagi penelitian baru yang dilakukan oleh orang lain²⁰. Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang tersedia untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan topik yang dibahas, seperti apa bentuk kampanye yang dilakukan oleh ULMWP dalam mencari dukungan MSG Group agar bisa memberikan dukungan kepada mereka. Kemudian penulis juga memberikan data berupa seperti apa operasi militer yang dilakukan oleh OPM dalam bentuk upaya Dekolonisasi.

Penulis akan melakukan analisis berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber terpercaya dan dengan menggunakan kerangka konsep yang ada pada penelitian ini. Penulis akan menganalisis strategi Dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia oleh ULMWP dengan menggunakan konsep Dekolonisasi diplomasi internasional yang digagas oleh Greg Frey dan Konsep Dekolonisasi berbentuk kekerasan yang digagas oleh Fanon..

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran dari kerangka konseptual yang penulis gunakan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Masa Kolonisasi Belanda di Papua dan Pengintegrasian Papua Ke Indonesia

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang sejarah tentang upaya pengintegrasian Papua ke Indonesia yang sebelumnya Papua masih menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Belanda yang menduduki wilayah tersebut bahkan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945.

BAB III : Sejarah dan Dinamika terbentuknya ULMWP.

²⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana terbentuknya ULMWP dan alasan yang melatarbelakangi terbentuknya ULMWP. Pada bab ini akan dijelaskan siapa-siapa saja aktor yang terlibat pada kemerdekaan Papua.

BAB IV : Analisis Upaya Dekolonisasi Papua Barat dari Indonesia oleh ULMWP.

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang penulis teliti dari proses pengumpulan data dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya. Data-data tersebut berupa apa bentuk Strategi Dekolonisasi yang dilakukan oleh ULMWP dengan menggunakan konsep dari Greg dan Fanon dalam menganalisis upaya Dekolonisasi.

BAB V : Kesimpulan

Bab terakhir yaitu berisi kesimpulan serta saran dari penulis terhadap penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Saran-saran tersebut dapat berupa saran kepada pihak yang terlibat serta kepada peneliti lainnya yang mungkin setelah ini akan meneliti isu yang sama dengan apa yang penulis teliti.

